

## Implementasi Economic Adjustment Program International Monetary Fund Dalam Penyelesaian Krisis Finansial Di Cyprus (Implementation of Economic Adjustment Program the International Monetary Fund in Financial Crisis Management in Cyprus)

Aprilia Santi, Puji Wahono, Djoko Susilo  
Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember (UNEJ)  
Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto, Jember, Kotak Pos 159  
E-mail: apriliasanti72@gmail.com, wahono.fisip@gmail.com, djokosusilo115@yahoo.co.id

### *Abstract*

*In the development of the world economy, there have been many various kinds of economic problems that occur in each country. Those problems eventually lead to a significant impact on the economy of the country. In addition, it also causes people to experience distress in every country in economic terms. One interesting example is the economic problem in the case of financial crisis that occurred in Cyprus. Financial crisis in Cyprus was due to the domino effect of the Greek crisis. Haircut policy that imposed by the Greek government in 2011 made fall of the obligations of Greek government bonds held by banks Cyprus. Haircut policy was set to make a cut of 75-80 % on Greek bonds. It makes Cyprus a financial crisis and the collapse of the banking Cyprus. Cyprus banking was even threatened to be closed. To overcome the financial crisis, the Government of Cyprus cut the country's budget. Unfortunately, these efforts were still not able to overcome the financial crisis and finally brought the government bailout of Cyprus to appeal to IMF as a global financial organization through EU summit on June 25, 2012. As a result, IMF agreed to provide bailout € 1 billion to Cyprus accompanied by economic adjustment program as a recipe to be run by the Government of Cyprus witnessed by the European Commission and European Central Bank. The economic adjustment program focused on the target of financial sector regulation and supervision, fiscal policy, fiscal structural measures, labor market, goods and services markets.*

**Keywords:** *Greek, Cyprus, financial crisis, IMF, Economic Adjustment Program*

### PENDAHULUAN

Ekonomi merupakan salah satu masalah yang penting bagi setiap negara. Pada umumnya, permasalahan ekonomi yang dialami oleh setiap negara-negara membawa dampak yang serius terhadap perekonomian negara tersebut. Bahkan, juga dapat membawa suatu negara mengalami krisis keuangan

atau finansial. Salah satu negara yang mengalami krisis finansial tersebut ialah Negara Cyprus.

Cyprus merupakan negara yang berada di kawasan Mediterania yang memiliki pendapatan tinggi yaitu dengan jumlah PDB sekitar US\$ 24 M (Mibragheri, 2010). Sejak beberapa waktu yang lalu, Cyprus dipercaya menjadi tempat pencucian uang dan menjadi tempat penyimpanan deposito asing karena memiliki pajak rendah dan terjaga keamanannya.

Sebagian besar deposito yang ada di Cyprus tersebut berasal dari deponan asal Rusia. Melalui banyaknya jumlah deposito yang ada di perbankan Cyprus, membuat Cyprus tergiur untuk melakukan investasi di negara lain. Salah satu tujuan investasi tersebut adalah Negara Yunani. Cyprus tergiur melakukan investasi melalui pembelian surat utang atau obligasi di Yunani disebabkan karena adanya tingkat suku bunga dan keuntungan yang tinggi. Selain itu, Cyprus semakin tergiur berinvestasi karena memiliki kedekatan sejarah dengan Yunani pada dulunya. Namun sayangnya, Cyprus tidak menghiraukan alasan Yunani memberlakukan tingkat suku bunga yang tinggi karena Yunani waspada terhadap terjadinya krisis (Nicolaou, 2013).

Hal tersebut terbukti pada tahun 2008 Negara Yunani mengalami krisis ekonomi di negaranya yang disebabkan oleh manipulasi jumlah utang, penggelumbungan dana renovasi stadion dan bandara, data statistik ekonomi makro, dan adanya pemborosan serta korupsi Pemerintah Yunani. Selain itu juga disebabkan oleh diangkatnya Perdana Menteri George Papandreou pada 2010 yang justru semakin membuat kondisi perekonomian Yunani terpuruk akibat penolakan rakyat terhadapnya dan menyebabkan menumpuknya utang Yunani sebesar 340 milyar Euro (Kusumawardhana, 2013).

Memburuknya kondisi perekonomian di Yunani akibat krisis ekonomi menyebabkan efek domino terhadap negara pemegang obligasi Pemerintah Yunani yaitu salah satunya adalah Negara Cyprus. Efek domino dari krisis Yunani tersebut membuat jatuhnya nilai surat utang atau obligasi Yunani yang dipegang oleh perbankan Cyprus. Hal ini diakibatkan adanya pemberlakuan kebijakan *haircut* oleh Pemerintah Yunani yaitu memberlakukan

potongan sebesar 75-80% terhadap pemegang obligasinya (Joan dan Theodore, 2010).

Kebijakan *haircut* yang diberlakukan oleh Yunani tersebut menyebabkan melemahnya perbankan Cyprus yang menyebabkan krisis finansial dan terhambatnya perbankan Cyprus yang mengarah untuk terjadi keruntuhan dan bahkan terancam ditutup. Hal ini terlihat pada runtuhnya dua perbankan besar di Cyprus yaitu Laiki Bank dan Bank of Cyprus karena dua bank tersebut merupakan pemegang terbesar obligasi Yunani. Sebagai upaya untuk mengatasi runtuhnya dua bank tersebut, Pemerintah Cyprus melakukan pemangkasan anggaran belanja negara dan memohon *bailout* kepada Rusia dan Uni Eropa. Akan tetapi, upaya tersebut masih belum bisa mengatasi runtuhnya bank-bank tersebut dan memulihkan kondisi keuangan di Cyprus (Georglou, 2012).

Melihat semakin terpuruknya krisis finansial yang terjadi di Cyprus, Pemerintah Cyprus memohon *bailout* kepada IMF melalui negosiasi di dalam KTT Uni Eropa di Brusel pada 25 Juni 2012. Dalam permohonan *bailout* tersebut, Cyprus diharuskan memenuhi syarat-syarat dari IMF yaitu pengurangan defisit 2,4% dari nilai GDPnya, menaikkan pajak 9,9% terhadap investasi dan deposito asing, serta melakukan pembatasan penarikan dan maksimal 300 euro dan pemindahan dana maksimal 1000 euro (Georglou, 2012).

Menyikapi syarat-syarat tersebut, Pemerintah Cyprus menyetujui dan memberlakukannya di dalam negaranya. Hasilnya, pada 15 Mei 2013 IMF sepakat untuk memberikan *bailout* sebesar 1 miliar Euro kepada Cyprus dengan menghadirkan saksi Komisi Eropa dan Bank Sentral Eropa (Hayden, 2010).

Pemberian *bailout* tersebut disertai resep dari IMF untuk Cyprus yaitu *Economic Adjustment*

*Program* atau program penyesuaian ekonomi. EAP tersebut merupakan sebuah bentuk paket dari *struktural adjustment program* yang khusus pada penyesuaian ekonomi dan merupakan alat untuk menstabilkan kembali kondisi keuangan di Cyprus akibat krisis finansial. Program penyesuaian ekonomi ini harus diterapkan di Cyprus dengan tujuan untuk mengatasi masalah keuangan, fiskal dan langkah-langkah yang dihadapi perekonomian dengan cara menentukan mencakup periode 2013-2016 (European Commission, 2013).

Berdasarkan pemaparan permasalahan tersebut, maka penulis merumuskan masalah yakni “Bagaimana implementasi *Economic Adjustment Program* IMF dalam penyelesaian krisis finansial di Cyprus?” Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi *economic adjustment program* IMF dalam penyelesaian krisis finansial di Cyprus. Manfaat dari penulisan karya ilmiah ini adalah memberikan informasi kepada pembaca mengenai implementasi *economic adjustment program* IMF yang dilakukan di Cyprus dalam menyelesaikan krisis finansialnya. Dengan memperhatikan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan, maka penulis tertarik untuk mengambil judul “**Implementasi Economic Adjustment Program International Monetary Fund Dalam Penyelesaian Krisis Finansial Di Cyprus**”

#### KERANGKA PEMIKIRAN

Dalam studi hubungan internasional, perdamaian merupakan suatu faktor yang selalu diinginkan oleh setiap negara (Jackson dan Sorensen, 2005). Dalam mewujudkan perdamaian tersebut, diperlukan negosiasi yang menentukan dan membawa

terjadinya kerjasama dengan hasil yang baik pula. Negosiasi sendiri merupakan kotak atau komunikasi antara pembuat kebijakan dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan (Djalantik, 2008).

Berdasarkan definisi tersebut, tersirat bahwa konsep negosiasi merupakan alat yang digunakan untuk mewujudkan suatu perdamaian melalui kesepakatan antara pihak terkait. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa setiap negara memiliki kepentingan masing-masing dan nantinya menuntut suatu *win-win solutions* diantara pihak-pihak terkait tersebut (Mauna, 2010).

Seiring dengan keberhasilan negosiasi, sebuah kebijakan perlu diterapkan oleh negara-negara pelaku negosiasi yang telah melakukan kesepakatan bersama. Untuk menerapkan kebijakan tersebut, konsep implementasi kebijakan diperlukan untuk menjelaskan bagaimana proses penerapan kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan merupakan perbuatan melakukan sesuatu yang pada akhirnya akan memberikan dampak terhadap sesuatu yang merupakan objek dari implementasi itu sendiri (Widodo, 2011). Dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan tersebut, pendekatan *implementation problem approach* digunakan untuk mendukung keberhasilan dari implementasi kebijakan itu (Abdul Wahap, 2006).

Penulis menggunakan konsep negosiasi dan implementasi kebijakan karena adanya upaya Pemerintah Cyprus dalam mendapatkan *bailout* yang dilakukan melalui negosiasi dengan IMF dalam KTT Uni Eropa yang disertai dengan *economic adjustment program* yang harus diterapkan di Cyprus. Dalam menerapkan EAP tersebut, Cyprus menggunakan pendekatan *implementation problem approach* yaitu melakukan pendekatan masalah implementasi dengan melihat bagaimana kondisi Cyprus sebelum diberikan

EAP dan kondisi Cyprus nantinya setelah diberikan EAP tersebut. Melalui pendekatan tersebut, IMF menfokuskan sasaran program penyesuaian ekonomi yaitu pada pengaturan dan pengawasan sektor keuangan, kebijakan fiskal, ukuran penyusunan fiskal, pasar tenaga kerja, serta pasar barang dan jasa.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan metode pengumpulan data dan metode analisis data. Pada metode pengumpulan data, penulis hanya melalui ruang baca Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, Perpustakaan Pusat Universitas Jember, buku-buku koleksi pribadi, situs-situs internet, dan media cetak (koran, surat kabar, dll). Sedangkan, metode analisis data penulis menggunakan analisis deskriptif dan kualitatif.

Metode analisis data deskriptif adalah salah satu jenis metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya dan bersifat noneksperimen, karena pada penelitian ini, peneliti tidak melakukan kontrol dan manipulasi variabel penelitian (Mochtar, 1984). Sedangkan metode analisis data kualitatif merupakan jenis metode penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan (Surachman, 1978).

## HASIL PENELITIAN

Hasil analisa yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa upaya pemerintah Cyprus dalam mendapatkan *economic adjustment program* dari IMF tersebut didapatkan melalui KTT Uni Eropa menggunakan pendekatan *implementation problem approach* yaitu dengan melakukan pendekatan

masalah implementasi dengan melihat bagaimana kondisi Cyprus sebelum dan sesudah diberikan EAP tersebut oleh IMF (Abdul Wahap, 2006).

Melalui pendekatan tersebut, implementasi EAP difokuskan sasarannya, yaitu yang pertama pada pengaturan dan pengawasan sektor keuangan. Dalam pengaturan dan pengawasan sektor keuangan, sektor perbankan Cyprus telah dipengaruhi oleh sistem perekonomian Eropa karena Cyprus merupakan anggota Uni Eropa yang secara tidak langsung terintegrasi oleh sistem perekonomian Eropa tersebut. Selain itu, sektor keuangan Cyprus juga dipengaruhi oleh Yunani melalui keterbukaan Pemerintah Cyprus terhadap warga Yunani dalam melakukan transaksi perekonomian di Cyprus. Untuk mengatasinya, Pemerintah Cyprus melakukan cara-cara yaitu dengan mempertahankan likuiditas pasar, melakukan pengembalian modal yang memadai, melakukan penilaian terhadap akutansi dan laporan perkreditan perbankan Cyprus, melakukan perubahan kerangka kerja bank, pemantauan utang perusahaan dan rumah tangga dengan memberikan laporan setiap 3 bulan sekali (European Commission, 2013).

Kedua, kebijakan Fiskal. Kebijakan fiskal menjadi sasaran implementasi EAP karena melalui pendapatan dan pengeluaran pemerintah yang berupa pajak, dapat mewujudkan kestabilan perekonomian kembali di Cyprus. Pemerintah Cyprus melalui kebijakan fiskalnya, menetapkan pajak sebesar 9,9% terhadap investasi dan deposito asing yang sebelumnya hanya 5,6% dan menaikkan pajak perusahaan sebesar 2%. Selain itu, Pemerintah Cyprus juga harus menempatkan keuangan publik dalam jalur yang berkelanjutan dengan melakukan stabilisasi ekonomi dan pengembalian kepercayaan perusahaan, masyarakat, dan investor asing, serta memperpanjang pembekuan upah terhadap sektor publik dan

memberlakukan pajak 6% terhadap dana pensiunan dan menaikkan beacukai pada tembakau, produk minyak, dan kekayaan pribadi (Copelovitch, 2010).

Ketiga, yaitu langkah-langkah penyusunan fiskal. Pemerintah Cyprus melakukan cara-cara yaitu dengan reformasi pensiun yang memberikan hukuman terhadap para pensiunan dini dan penetapan pajak sebesar 10% terhadap gaji pensiunan untuk diberikan kepada Pemerintah Cyprus berdasarkan Government Employee Pension Scheme (GEPS) dan General Social Insurance Scheme (GSIS). Selain itu, Pemerintah Cyprus juga melakukan privatisasi badan usaha milik negara (BUMN) dan reformasi administrasi publik dengan melakukan langkah-langkah seperti penghapusan hambatan-hambatan dalam hubungan karyawan, merampingkan tunjangan, meminimalkan pembiayaan, dan melaksanakan kinerja sesuai kemampuan (IMF, 2013).

Keempat, pasar tenaga kerja. Sebelum terjadinya krisis finansial di Cyprus, tingkat pengangguran di Cyprus relatif rendah karena banyaknya lapangan pekerjaan yang terdapat dinegara tersebut. Namun, sejak terjadinya krisis finansial, perusahaan-perusahaan melakukan pemecatan atau PHK terhadap karyawan mereka sehingga menyebabkan menumpuknya pengangguran. Untuk mengatasinya, pemerintah melakukan reformasi terhadap biaya penyesuaian hidup (COLA) dari gaji atau upah dan memberikan upah minimum dengan maksud mencegah persaingan di dalam lapangan kerja (IMF, 2013)

Kelima, pasar barang dan jasa. Untuk mengatasi permasalahan dalam pasar barang dan jasa, Pemerintah Cyprus melakukan pengurangan pemasangan iklan-iklan yang menyebabkan pengeluaran pemerintah terlalu banyak dan melakukan penghapusan hambatan-hambatan dalam pasar barang

dan jasa seperti menurunkan harga sewa kamar hotel dan makanan sebagai tempat singgah para wisatawan asing. Selain itu, Pemerintah Cyprus juga melakukan pengurangan biaya pada transportasi, komunikasi, dan melakukan perbaikan pelayanan terhadap wisatawan asing (European Commission, 2013).

Dalam pelaksanaan implementasi *economic adjustment program* dari IMF, rakyat Cyprus memberikan respon yang positif terhadap langkah-langkah yang dijalankan oleh Pemerintah Cyprus tersebut. Rakyat memberikan dukungan penuh terhadap Pemerintah Cyprus karena mereka sudah pasrah dan tidak bisa melakukan penolakan terhadap pemerintahnya karena mereka takut akan kehilangan dana tabungan mereka yang berada di perbankan Cyprus. Respon positif dari masyarakat tersebut juga didorong oleh tindakan Presiden Nicos Anastasiades yang bersedia melakukan pemotongan terhadap gajinya sebesar 25%, gaji para amenterinya sebesar 20%, dan para pejabat tinggi negara juga menyetujui untuk tidak menerima gaji ke-13 pada tahun 2013 (IMF, 2013).

Rakyat Cyprus juga memberikan dukungan melalui tindakan Kepala Gereja Ortodoks Cyprus, Uskup Agung Chrysostomos II, yang menawarkan kepada Pemerintah Cyprus untuk menggadaikan aset milik gereja berupa tanah dan hotel yang bernilai milyaran dolar untuk membantu negaranya keluar dari masalah krisis keuangan. Akan tetapi, jumlah nilai aset gereja Ortodoks tersebut tidak diketahui berapa detail jumlahnya. Pihak Uskup Agung hanya menyebutkan bahwa aset yang dimiliki gereja Ortodoks tersebut mampu untuk menyelamatkan Cyprus. Uskup Agung juga mengajak rakyat Cyprus untuk berkorban dan membayar kembali utang negaranya. Selain itu, Uskup juga menyarankan agar Pemerintah Cyprus membuat obligasi negara. Melalui tindakan yang dilakukan oleh

gereja tersebut menjadi sebuah teladan bagi seluruh masyarakat Cyprus. Uskup yakin bahwa gereja masih memiliki pengaruh yang besar di dalam Negara Cyprus dan yakin bahwa rakyat Cyprus akan saling mendukung untuk membantu pemerintah dalam mencari solusi krisis finansialnya (Crishtian, 2013).

Melalui respon positif dan dukungan penuh dari rakyat Cyprus terhadap Pemerintah Cyprus, pelaksanaan *economic adjustment program* IMF di Cyprus yang disasarkan pengaturan dan pengawasan sektor keuangan, kebijakan fiskal, langkah-langkah penyusunan fiskal, pasar tenaga kerja, serta pasar barang dan jasa mengalami keberhasilan. Dengan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Cyprus pada pengaturan dan pengawasan sektor keuangan, Pemerintah Cyprus berhasil melakukan penyerahan laporan keuangan pada Komisi Eropa, Bank Sentral Cyprus, dan IMF yang telah dilakukan pada 2 kuartal yaitu kuartal pertama pada Bulan September dan Desember 2013. Dalam laporan keuangan tersebut, menunjukkan adanya peningkatan pada investasi internasional Cyprus yaitu pada September 2013 mencapai € 17.125,6 juta dibandingkan dengan € 15.753,2 juta pada Juni 2013. Serta, utang eksternal dari Cyprus sebesar € 58.183,3 juta pada September 2013 dibandingkan dengan € 61.461,4 juta pada Juni 2013 (European Commission, 2013).

Pemerintah Cyprus juga berhasil melakukan pengawasan pada sektor perbankan dan lembaga kredit serta melakukan transparansi keuangan yaitu melalui peningkatan pembatasan penarikan uang maksimal sebesar 300 Euro dan pemindahan uang maksimal sebesar 1000 Euro sesuai kesepakatan pada bulan Agustus 2013. Peningkatan transparansi keuangan tersebut telah berhasil mengurangi jumlah utang dalam negeri Cyprus yaitu sebesar 1 milyar Euro yang dilakukan oleh Bank Sentral Cyprus. Selain itu,

pada bulan September 2013, untuk melakukan pembersihan pada perbankan Cyprus, Pemerintah Cyprus melakukan penggantian CEO (*Chief Executive Officer*) pada *Bank Of Cyprus* yaitu Mr. John Hourican (IMF, 2013).

Keberhasilan EAP juga terjadi pada surplus sebesar 7,4% pada akhir Desember 2013, dibandingkan dengan tahun 2012 yang hanya sebesar 4% dari PDB Cyprus. Hal tersebut terjadi karena adanya peningkatan pajak sebesar 9,9% terhadap investasi dan deposito asing di atas 100.000 Euro dan 10% terhadap pajak perusahaan. Selain itu, juga karena adanya peningkatan beacukai terhadap produk tembakau 150 Euro, produk minyak sebesar 0,08 Euro, dan pajak atas kekayaan pribadi sebesar 21% (IMF, 2013).

Pada langkah-langkah penyusunan fiskal, EAP IMF tersebut berhasil melakukan pemotongan dana pensiunan sebesar 10%, menetapkan umur pensiun yaitu umur 60 tahun, dan menetapkan pajak sebesar 6% serta memberikan hukuman sesuai *Government Employee Pension Scheme* dan *Social Insurance Scheme* terhadap pensiunan dini karyawan atau pegawai di Cyprus (European Commission, 2013).

Implementasi EAP juga berhasil melakukan reformasi terhadap biaya penyesuaian hidup (COLA) dan menerapkan pemberian upah minimum terhadap karyawan atau pegawai secara merata yang bertujuan untuk menghindarkan tingkat kesenjangan di antara karyawan di Cyprus. Selain itu, sektor perdagangan juga membuktikan adanya perbaikan. Hal itu terlihat pada menurunnya impor yang terjadi di Negara Cyprus dan keterbukaan perekonomian Cyprus terhadap investor asing. Sedangkan pada pasar jasa, Pemerintah Cyprus berhasil menghilangkan hambatan-hambatan dengan melakukan perbaikan pada sistem pengelolaan

hotel dan penurunan harga kamar ataupun makanan di hotel-hotel sebagai tempat singgah para wisatawan. Pengurangan iklan-iklan yang berlebihan juga telah dapat diminimaliskan dan memperkecil pengeluaran Pemerintah Cyprus dengan mengganti pemasangan iklan atau promosi pariwisata melalui media online atau internet (IMF, 2013).

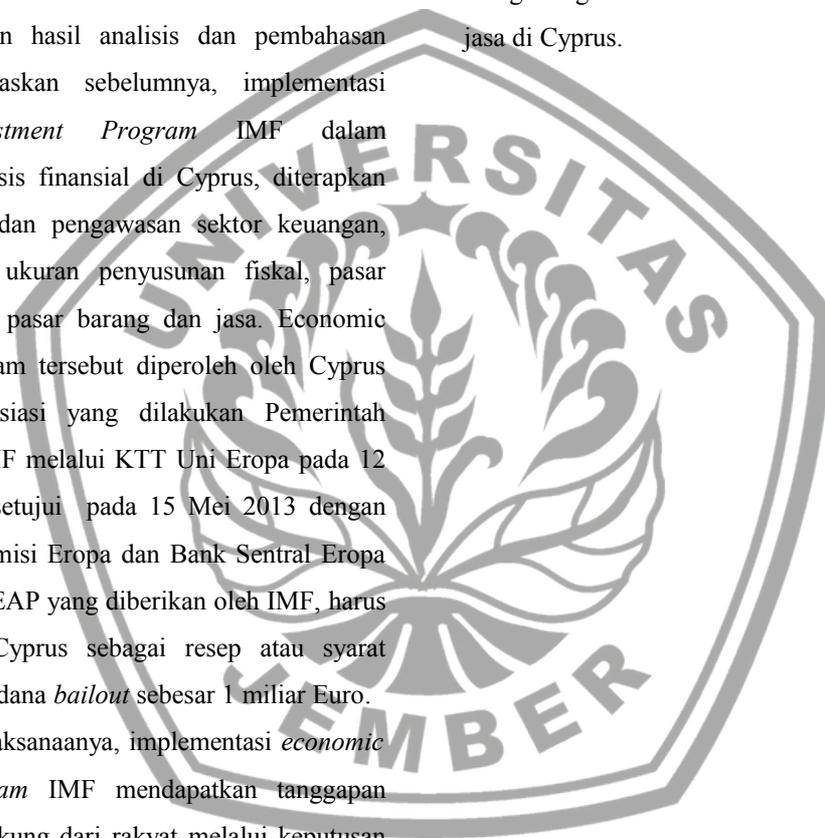
### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, implementasi *Economic Adjustment Program* IMF dalam menyelesaikan krisis finansial di Cyprus, diterapkan pada pengaturan dan pengawasan sektor keuangan, kebijakan fiskal, ukuran penyusunan fiskal, pasar tenaga kerja, dan pasar barang dan jasa. *Economic Adjustment Program* tersebut diperoleh oleh Cyprus berdasarkan negosiasi yang dilakukan Pemerintah Cyprus dengan IMF melalui KTT Uni Eropa pada 12 Juni 2012 dan disetujui pada 15 Mei 2013 dengan menghadirkan Komisi Eropa dan Bank Sentral Eropa sebagai saksinya. EAP yang diberikan oleh IMF, harus dijalankan oleh Cyprus sebagai resep atau syarat seiring pemberian dana *bailout* sebesar 1 miliar Euro.

Dalam pelaksanaannya, implementasi *economic adjustment program* IMF mendapatkan tanggapan positif dan mendukung dari rakyat melalui keputusan Presiden Nicos untuk melakukan pemotongan gajinya sebesar 25% dan 20% pada gaji para menteri di Cyprus. Selain itu, juga ditunjukkan pemberian ijin dari Kepala Gereja Ortodoks Cyprus, Uskup Agung Chrysostomos II untuk menggadaikan gereja Ortodoks di Cyprus kepada Pemerintahan Cyprus.

Implementasi EAP tersebut menunjukkan keberhasilan, yaitu transparansi sistem keuangan melalui pemberian laporan keuangan pada bulan

September dan Desember pada Komisi Eropa, Bank Sentral Eropa, dan IMF, pembatasan penarikan uang maksimal 300 Euro dan pemindahan uang maksimal 1000 Euro, Pemerintah Cyprus mengalami surplus sebesar 7,4% pada Desember 2013 melalui peningkatan pajak pada investasi dan deposito asing 9,9%, penetapan umur pensiunan yaitu umur 60 tahun dan pajak sebesar 6% terhadap gaji pensiunan, persamaan pemberian upah minimum karyawan, serta menghilangkan hambatan-hambatan pasar barang dan jasa di Cyprus.



## F. DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abdul Wahab, Solichin. 2006. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Copelovitch, Mark S. 2010. *The International Monetary Fund in the Global Economy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Djalantik, Sukawarsini. 2008. *Diplomasi antara Teori dan Praktik: Edisi Pertama*, Yogyakarta, Graha Ilmu.
- European Commission. 2013. *The Economic Adjustment for Cyprus*. Belgium: European Union.
- G. Chr. Georglou. 2012. *Cyprus in Figures( 2011-2012 Edition)*. Cyprus: The Press and Information Office for the Statistical Service.
- Hayden, Joseph R. 2010. *Negotiating in The Press*. United States: Lousiana State University Press.
- Joan H. Feeney and Theodore W. Corrolly. 2010. *The Road Out of Debt: Bankrupcy and Other Solutions to Your Financial Problems*. Canada: John and Sons, Inc.
- Mas'oed, Mochtar. 1984. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES.
- Mauna, Boer. 2010. *Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Bandung: Pt. Alumni.
- Mibragheri, Farid. 2010. *Historical Dictionary of Cyprus*, Toronto: The Scarecrow Press, Inc.
- Nicolaou, Chr. 2013. *Tax Fact and Figures 2013-Cyprus*. Cyprus: Pwc.
- Robert Jackson dan Georg Sorensen. 2005. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Surachmad, Winarno. 1978. *Dasar dan Teknik Riset : Pengantar Metodologi Research Ilmiah*. Bandung: CV. Tarsito.
- Widodo. 2011. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media.

**Jurnal:**

Kusumawardhana, Indra. 2013. *European Union In Crisis: Menguatnya Pandangan Berbasis Kedaulatan di dalam Krisis Ekonomi Uni Eropa*, Jurnal Hubungan Internasional.

**Internet:**

Christian. *Gereja Ortodoks Siprus Tawarkan Aset Gereja Untuk Atasi Krisis*. Diakses dari <http://www.jawaban.com/index.php/news/detail/id/90/news/130321183808/limit/0/Gereja-Ortodoks-Siprus-Tawarkan-Aset-Gereja-Untuk-Atasi-Krisis> Diterbitkan pada 21 Maret 2013. Diakses pada tanggal 5 Februari 2014.

European Commission. 2013. *The economic adjustment programme for cyprus-first review-summer 2013*. Diakses dari <http://www.gnora.com/Library/2013/50770.aspx?langen-GB> Diterbitkan pada 15 Mei 2013. Diakses pada tanggal 14 Februari 2014.

IMF. 2013. *First Review Under The Extended Arrangement Under The Extended Fund Facility And Request For Modification Of Performance Criteria*. Diakses dari <http://Www.Imf.Org/External/Pubs/Ft/Scr/2013/Cr13293.Pdf> Diterbitkan pada 30 September 2013. Diakses Pada Tanggal 7 Februari 2014.

IMF. 2013. *IMF Completes Second Review Under Extended Fund Facility Arrangement for Cyprus and Approves €83.5 Million Disbursement*. Diakses dari <http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2013/pr13538.htm> Diterbitkan pada 20 Desember 2013. Diakses pada tanggal 7 Februari 2014.

IMF. 2013. *Second Review Under The Extended Arrangement Under The Extended Fund Facility And Request For Modification Of Performance Criteria*. Diakses dari <http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2013/cr13374.pdf> Diterbitkan pada 23 Desember 2013. Diakses pada tanggal 7 Februari 2014.